



Optimalisasi Dana Bansos di Masa Pandemi Covid-19 di Mekarbaru, Desa Alamendah

Novianti Nabila¹, Assyifa Junitasari²

¹Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung;

²Jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
noviantinabila1@gmail.com¹, assyifajunitasari@uinsgd.ac.id

Abstrak

Pandemi virus yang menyebar di berbagai daerah di Indonesia, juga dialami 223 negara di berbagai belahan dunia. Sejak kasus COVID-19 mencuat di Indonesia, jumlah pasien yang terkonfirmasi positif virus ini terus meningkat. Pandemi COVID-19 ditetapkan sebagai kedaruratan bencana nasional. Hal ini tentu meluluhlantakan tatanan kehidupan, tatanan ekonomi, tatanan sosial, dan pendidikan. Berdasarkan data IDX Channel, penurunan pertumbuhan laju ekonomi Indonesia pada Triwulan II-2020 menjadi negatif sebesar -5,32%. Pandemi COVID-19 ditetapkan sebagai kedaruratan bencana nasional. Masalah yang dikaji dalam penulisan artikel adalah optimalisasi dana bantuan sosial di masa pandemi COVID-19. Tujuan penulisan dilakukan untuk menganalisis efektivitas penyaluran bantuan sosial pemerintah untuk mengatasi dampak COVID-19 berlangsung sehingga artikel ini diharapkan menjadi satu referensi dan inovasi baru dalam penyaluran bantuan sosial pemerintah yang dilaksanakan di Kampung Mekarbaru. Penulis menggunakan metode penulisan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana bantuan sosial di Kampung Mekarbaru, Desa Alamendah, Kabupaten Bandung dapat dikatakan optimal dalam menyalurkan dana bantuan sosial, karena hal ini terkoordinasi secara baik mulai dari tiap RT, RW, dan Pemerintah Desa.

Kata Kunci: COVID-19, Bantuan Sosial, Ekonomi

Abstract

The virus pandemic that has spread in various regions in Indonesia has also been experienced by 223 countries in various parts of the world. Since the case of COVID-19 emerged in Indonesia, the number of patients who were confirmed positive for this virus has continued to increase. The COVID-19 pandemic has been declared a national disaster emergency. This of course destroys the order of life, economic order, social order, and education. Based on IDX Channel data, the decline in Indonesia's economic growth rate in Quarter II-2020 became negative by -5.32%. The COVID-19 pandemic has

been declared a national disaster emergency. The problem studied in writing the article is the optimization of social assistance funds during the COVID-19 pandemic. The purpose of writing is to analyze the effectiveness of the distribution of government social assistance to overcome the ongoing impact of COVID-19 so that this article is expected to be a new reference and innovation in the distribution of government social assistance carried out in Mekarbaru Village. The author uses a qualitative writing method with a descriptive approach. The results showed that the distribution of social assistance funds in Mekarbaru Village, Alamendah Village, Bandung Regency can be said to be optimal in distributing social assistance funds, because this is well coordinated starting from each RT, RW, and Village Government.

Keywords: COVID-19, Social Assistance, Economy

A. PENDAHULUAN

Sejak Desember 2019, *World Health Organizations* (WHO) melaporkan adanya temuan penyakit baru bernama virus Corona di Wuhan. Dilansir dari Kompasmedia.com, pandemi virus Coronavirus Disease yang selanjutnya disebut COVID-19 berawal dari adanya laporan temuan kasus pneumonia yang tengah jadi topik utama di Kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019 (Rumbo, 2020). Dalam waktu singkat, wabah virus ini menyebar luas di daratan China bahkan sampai ke negara Eropa. Namun hingga Februari 2020, Indonesia belum ada kasus orang terinfeksi. Hingga pada Maret 2020, Presiden Republik Indonesia memublikasikan kasus COVID-19 pertama di Indonesia di Depok. Pandemi virus yang menyebar di berbagai daerah di Indonesia, juga dialami 223 negara di berbagai belahan dunia. Sejak kasus COVID-19 mencuat di Indonesia, jumlah pasien yang terkonfirmasi positif virus ini terus meningkat. Berdasarkan data Peta Sebaran COVID-19 per tanggal 17 September 2021 sebanyak 4.185.144 temuan kasus positif di Indonesia. Jumlah pasien yang sembuh 3.976.064 orang dan meninggal sebanyak 140.138 orang (Satgas COVID-19, 2021). Pandemi COVID-19 ditetapkan sebagai kedaruratan bencana nasional. Hal ini tentu meluluhlantahkan tatanan kehidupan, tatanan ekonomi, tatanan sosial, dan pendidikan.

Dapat dilihat dari Gambar 1, data dari IDX Channel mencatat penurunan pertumbuhan laju ekonomi Indonesia pada Triwulan II-2020 menjadi negatif sebesar -5,32%. Sebelumnya, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2020 sebesar 2,97 atau mulai menandakan adanya perlambatan laju aktivitas perekonomian. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diimplementasikan pemerintah dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 menjadi salah satu faktor perlambatan laju ekonomi selama pandemi berlangsung. Ruang gerak masyarakat yang dipersempit dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup.

Gambar 1

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020



Sumber: (IDX CHannel, 2020)

Merespon hal tersebut, pemerintah dalam hal ini memiliki beberapa kebijakan untuk melindungi perekonomian rakyat melalui program rakyat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanganan pandemi Covid-19. Salah satunya dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 perihal Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Serta Kestabilan Sistem Keuangan Dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam skema menghadapi acaman yang dapat berpengaruh bagi perekonomian nasional.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan studi terkait bagaimana optimalisasi dana bansos di tengah situasi pandemi COVID-19. Tujuan penulisan dilakukan untuk menganalisis efektivitas penyaluran bantuan sosial pemerintah untuk mengatasi dampak COVID-19 berlangsung sehingga artikel ini diharapkan menjadi satu referensi dan inovasi baru dalam penyaluran bantuan sosial pemerintah yang dilaksanakan di Kampung Mekarbaru.

B. METODE PENGABDIAN

Metode yang digunakan dalam masa pengabdian KKN-DR yakni merencanakan berbagai program kegiatan pengabdian yang dilakukan di Desa Alamendah khususnya di RW. 03 Kampung Mekarbaru. Rembug warga dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang ada di Kampung Mekarbaru.

Penulis menggunakan metode penulisan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Arikunto (2019: 3) penulisan deskriptif adalah penulisan yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penulisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dengan menggunakan metode ini, maka penulis akan mendapatkan data secara utuh dan dapat dideskripsikan dengan jelas sehingga hasil penulisan ini benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.

Berikut adalah metode pengabdian yang penulis lakukan dalam kegiatan KKN-DR SISDAMAS di Kp. Mekar Baru Desa Alamendah adalah sebagai berikut:

1. Proses Kegiatan

Kegiatan rembug warga dilakukan dalam rangka untuk mengetahui berbagai permasalahan yang ada di lingkungan RW 03 Mekar Baru terutama dalam pengoptimalan dana bantuan sosial di lingkungan Kampung Mekar Baru Desa Alamendah.

2. Partisipan Kegiatan

Partisipan dalam kegiatan ini yaitu masyarakat Kampung Mekar Baru Desa Alamendah termasuk para Tokoh Masyarakat, RT dan RW, DKM, Perwakilan Diniyah serta Pemuda - pemudi Kampung Mekar Baru. Berikut gambar partisipan yang hadir pada saat kegiatan berlangsung :



Gambar 2. Partisipan Kegiatan

3. Respon

Masyarakat Kampung Mekarbaru menyambut baik kebijakan pemerintah dengan adanya bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak pandemi.

4. Hasil Kegiatan

Masyarakat Kampung Mekar Baru dapat mengoptimalkan dana bantuan sosial dengan baik. Kebijakan RT RW setempat mengoptimalkan dana penerima bantuan sosial sebaik mungkin dengan mengikuti uptrend digital yang disediakan pemerintah provinsi melalui fitur di aplikasi Sapawarga, Ketua RW membantu melakukan verifikasi calon penerima bantuan sosial dari data yang tersedia juga memastikan data yang benar membutuhkan bisa mendapatkan haknya. Keterlibatan warga jadi mempunyai peran kunci dalam penyelenggaraan Bansos Provinsi yang lebih tepat sasaran.

C. PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

Kuliah Kerja Nyata merupakan suatu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang termasuk ke dalam tridarma perguruan tinggi. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu keharusan bagi mahasiswa sebagai bentuk pengimplementasian tridarma perguruan tinggi. Selain mempelajari keilmuan dalam bentuk teori mahasiswa juga harus mengimplementasikannya di tengah kehidupan masyarakat agar tercipta suatu relevansi antara teori dengan praktik.

Di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, daerah yang memungkinkan untuk dijadikan tempat pelaksanaan pengabdian adalah lingkungan dengan tingkat risiko penularan sangat rendah (zona hijau). Adapun tempat yang penulis pilih adalah daerah Kp. Mekar Baru Desa Alamendah. Kampung Mekar Baru merupakan wilayah RW 03 yang berdekatan dengan kantor Desa Alamendah.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh kelompok yakni melaksanakan berbagai program kegiatan yang telah direncanakan dan beberapa program kegiatan yang dilaksanakan secara langsung. Beberapa program kegiatan yang direncanakan oleh kelompok yakni diantaranya pembuatan handsanitizer dari bahan alami, peringatan hari besar umat Islam (Tahun Baru Hijriyah) sebagai refleksi agama dan sosial terhadap masyarakat, Mengajar di sekolah agama untuk mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari kepada anak-anak di sekolah agama Sabilil Huda untuk memberikan pengetahuan agama sejak dini dengan menerapkan pola mengajar kepada anak-anak secara variatif.

Kegiatan program yang dilaksanakan secara langsung diantaranya pengajian rutin pada malam Jumat, Kontribusi dalam kompetisi Desa Wisata se-Indonesia, Kegiatan kesenian Terbangun khas Desa Alamendah, Relawan panitia distributor BLT Dana Desa Alamendah, Membantu kegiatan renovasi masjid Sabilil Huda Kampung Mekarbaru.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Desa Alamendah, Kampung Mekarbaru

Desa Alamendah merupakan salah satu Desa Agronomi yang terletak disebelah selatan ibukota Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Adapun luas wilayah Desa Alamendah sekitar 505,6 Ha dan dihuni oleh 7068 Kepala Keluarga atau 22673 jiwa. Adapun letak geografis Desa Alamendah yaitu antara 7,11',0"-7,15',0" BT dan 107,15',0"-s/d 107,2',2" (Profil Desa Alamendah, 2019). Daerah yang penulis pilih sebagai tempat pengabdian masyarakat yaitu kampung Mekar Baru. Kampung Mekar Baru merupakan wilayah RW 03 yang berdekatan dengan kantor Desa Alamendah. Tinggi wilayah kampung Mekar Baru yaitu 1580 mdpl. Suhu rata rata di wilayah yaitu pada 10°C-20°C. Kemudian jumlah penduduk kampung Mekar Baru yaitu sebanyak 1127 jiwa, perempuan sebanyak 551 jiwa dan laki laki 576 jiwa. Kampung Mekar Baru

terdiri dari 4 RT yang ditandai dengan batas batas tiap wilayah. Adapun batas RW 03 bagian barat yaitu wilayah RW 02, bagian utara yaitu kampung Ciburial, bagian timur yaitu kampung Ciole-ole, dan bagian selatan yaitu kawasan hutan.

Mata pencaharian masyarakat yang berada di kampung Mekar Baru yaitu sebagian besar petani dan pedang dengan persentase 60% petani, 20% pedagang dan 20% lain-lain. Adapun potensi wilayah yang terdapat di kampung Mekar Baru yaitu terdapat pada beberapa sektor diantaranya pada sektor pertanian, UMKM yang terdiri dari bisnis bunga potong, berbagai macam olahan strawberry, produk teh telang, teh daun tin, kopi kemasan, produk susu perah, penjualan sayuran ecer, pupuk organik. Adapun pada sektor peternakan yaitu peternakan cacing dari limbah sapi yang digunakan sebagai produk kecantikan, biogas dari limbah peternakan. Dari segi pendidikan terdapat formal PAUD dan Diniyah.

2. Penyaluran Bantuan Sosial di Indonesia

Krisis ekonomi yang dipicu pandemi COVID-19 telah memunculkan kebutuhan untuk menyempurnakan sistem bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Pandemi yang menyebabkan krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya (*unprecedented*) sehingga menimbulkan situasi yang penuh dengan ketidakpastian dalam masyarakat. Situasi seperti ini mendorong munculnya urgensi untuk memperbaiki sistem bansos secara menyeluruh. Pembuat kebijakan pun dituntut untuk merespons gejala sosial dalam masyarakat dengan cepat. Kedua hal ini bisa dicapai jika ada mekanisme koordinasi dan sinkronisasi yang melibatkan aktor-aktor terkait di berbagai lapisan pemerintahan.

Mengutip Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dalam (Noerkaisar, 2021) bahwasannya, selama ini kendala yang sering terjadi dalam skema bantuan sosial adalah ketidaktepatan target penerima bantuan.

Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan koordinasi menjadi kata kunci yang harus dilaksanakan secara efektif dalam situasi pandemi yang membutuhkan keputusan cepat. DTKS merupakan data acuan dalam pemberian bantuan yang berisi profil tingkat kesejahteraan individu dan keluarga. Problematika yang muncul yakni ketidakakuratan data, ada masyarakat yang berhak menerima bantuan namun tidak mendapatkan ataupun sebaliknya. Koordinasi antar instansi yang lamban dalam hal sinkronisasi data dari bidang sosial dan administrasi kependudukan di tingkat pusat dan daerah juga menambah tingkat kegagalan pelaksanaan kebijakan bantuan.

Kepala Desa/ Lurah maupun Ketua RT (Rukun Tetangga) merupakan aktor penting yang perlu diberdayakan untuk menjawab problem DTKS dan koordinasi. Pandemi COVID-19 dapat menjadi momentum pembersihan DTKS (*cleansing data*) yang dapat dilakukan oleh Kepala desa dan Ketua RT dikarenakan memahami profil masyarakatnya secara dekat. Kepala desa dan Ketua RT juga dapat melakukan koordinasi dengan sistem kelompok kepada Pemerintah Daerah setempat yang lebih

terorganisir karena tiap individu tidak langsung mengakses sendiri-sendiri kanal informasi dan pengaduan baik secara *online* (menghubungi jaringan digital yang disediakan pemerintah Pusat dan daerah) maupun *offline* (datang langsung ke dinas sosial atau disdukcapil) yang mengakibatkan antrian panjang penyelesaian.

3. Penilaian Mandiri oleh Penerima Bantuan

Dalam hal meredakan polemik di masyarakat terkait bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan memudahkan masyarakat untuk menilai dirinya apakah bisa mendapatkan bantuan atau tidak maka terdapat beberapa hal yang patut diketahui.

Pertama, mengetahui apakah dirinya termasuk dalam penerima program PKH atau tidak. Jika penerima PKH otomatis masuk data DTKS dan jika tidak maka masuk dalam klasifikasi non-DTKS. Hal ini penting diketahui karena kedua jenis data tersebut menerima bantuan yang berbeda. Kedua, memahami jenis bantuan pemerintah. Pemerintah pusat dan daerah memiliki program bantuan yang berbeda dan tidak diperkenankan menerima semuanya. Sebagai contoh, Pemerintah Pusat meningkatkan jumlah penerima manfaat PKH bagi yang terdata di DTKS dan bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat yang tidak terdata di DTKS di samping bantuan lainnya seperti bantuan sembako oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD serta BLT yang bersumber dari dana desa. Ketiga, mampu menjelaskan dirinya terdampak langsung atau tidak langsung akibat COVID-19 dan mengalami kesulitan untuk membayar cicilan alat produksi (motor, mobil, ataupun rumah) yang digunakan untuk usaha. Hal ini merupakan persyaratan untuk bantuan restrukturisasi kredit. Keempat, memahami isi bantuan maupun keberatan terkait bantuan. Masyarakat harus mengetahui besaran, jenis dan jangka waktu bantuan serta nomor kontak yang dapat dihubungi dalam melakukan pengaduan apabila bantuan yang diberikan tidak sesuai harapan.

Respon cepat pemerintah terkait kelemahan akurasi data serta kordinasi sangat diharapkan dalam memperbaiki implementasi kebijakan pemberian bantuan saat ini, mengingat kondisi pandemi yang masih terus berlangsung. Masyarakat juga diharapkan memiliki kesadaran dan pengetahuan informasi yang komperhensif terhadap kebijakan bantuan pemerintah agar tidak memicu *distrust* secara vertikal (pemerintah) maupun horizontal (antar masyarakat), terlebih lagi pengetahuan protokol pencegahan Covid-19 dalam pembagian bantuan pemerintah.

4. Aplikasi Sapawarga Sebagai Penunjang Optimalisasi Dana Bansos

Sejatinya pandemi COVID-19 merupakan masalah publik yang mengglobal dan menjadi tanggung jawab kolektif antar elemen di masyarakat, terlebih dampak yang ditimbulkannya turut memengaruhi kinerja demokrasi global. Teori kepublikan baru sepakat bahwasannya publik bukan menjadi urusan pemerintah negara saja, akan tetapi menjadi milik banyak entitas yang secara kolektif mengartikulasikan preferensi publik sehingga demokrasi bisa tetap ditegakkan (Suhudiyah, 2020). Tentu pandemi

COVID-19 ini telah meluluhlantahkan berbagai sektor baik itu sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, termasuk juga dalam pelayanan publik.

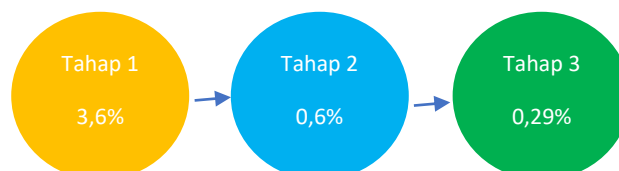
Aplikasi Sapawarga membantu masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan memastikan partisipasi publik tersalurkan dalam pembangunan daerah yakni dilakukan dengan polling dan survei yang dilakukan oleh pemerintah. Aplikasi Sapawarga dimaksudkan untuk membantu masyarakat Jawa Barat memiliki pengalaman digital yang dapat mempermudah akses komunikasi dan layanan publik dalam satu aplikasi. Partisipasi, informasi dan layanan publik terintegrasi dalam satu layanan publik yaitu dalam aplikasi Sapawarga. Di tahap pertamanya, akses aplikasi Sapawarga ini baru dapat diberikan kepada pengurus rukun warga (RW).

Sebagai salah satu upaya penanganan pandemi yakni adalah dengan saling bantu dengan menggunakan teknologi di tengah kesulitan masa pandemi. Gotong royong juga tercermin dari bagaimana pemerintah dan masyarakat bahu-membahu merespon kesulitan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi. Sapawarga merupakan aplikasi layanan publik satu pintu yang dikembangkan Jabar Digital Service sebagai ruang partisipasi publik dalam penanganan pandemi. Melalui fitur di aplikasi Sapawarga, Ketua RW membantu melakukan verifikasi calon penerima bantuan sosial dari data yang tersedia juga memastikan data yang benar membutuhkan bisa mendapatkan haknya. Keterlibatan warga jadi mempunyai peran kunci dalam penyelenggaraan Bansos Provinsi yang lebih tepat sasaran (Jabar Digital Service, 2020).

Hal ini didukung dengan data dari (Jabar Digital Service, 2020) bahwa sebanyak 18.763 Ketua RW menggunakan aplikasi Sapawarga dengan melakukan verifikasi data penerima bantuan sosial, dan telah membantu penyaluran kepada 1,9 juta keluarga penerima bantuan dari bantuan sosial provinsi. Data penerima bantuan yang diverifikasi oleh Ketua RW pun bisa dikawal melalui portal data solidaritas.jabarprov.go.id warga bisa melaporkan warga yang membutuhkan ataupun mengadakan ketidaksesuaian penyaluran dana di portal ini.

Gambar 3

Tahap Penyaluran Bantual Sosial Provinsi



Sumber: Laporan Akhir Tahun Jabar Digital Service (2020)

Peran masyarakat dalam keterlibatan memverifikasi data tercermin pada gambar data di atas bahwasanya kolaborasi antar warga dan pemerintah menggunakan sistem digital yang efisien, jumlah retur Bantuan Sosial Provinsi setiap tahapnya berhasil ditekan. Tak hanya soal kolaborasi, menangani pandemi juga diperukan komunikasi. Dengan dikembangkannya berbagai inovasi teknologi untuk penanganan pandemi juga perlu diberitakan agar masyarakat tahu bahwa ada wabah yang bisa dimanfaatkan untuk mengambil langkah penanganan yang terinformasi dan bahkan kesempatan untuk bisa berkontribusi.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berbicara mengenai bencana tentu tak bisa kita prediksi, bahwa prahara di berbagai tempat dengan segala keterbatasan penanganannya, pandemi Coronavirus Diseasi 2019 (COVID-19) telah memberikan dampak perubahan pada tatanan masyarakat. Tak hanya soal perubahan yang memaksa kita untuk membatasi segala jenis kegiatan, tetapi juga sedikit besarnya memberikan pelajaran besar bagi kita semua. Peran serta pelibatan masyarakat dalam setiap kebijakan dalam berbagai fitur di aplikasi Sapawarga yang menghimpun dan sebagai pengolahan data penerima Bansos Provinsi menjadi lebih transparan dan akuntabel di tengah pandemi.

2. Saran

Terdapat tiga hal utama yang perlu dilakukan. Pertama, perancangan mekanisme dan prosedur khusus untuk pendataan sasaran dan penyaluran bantuan yang lebih cepat dan tepat, terutama saat terjadi krisis ekonomi akibat bencana nonalam. Kedua, pendelegasian wewenang dan peran untuk melakukan koordinasi dalam menjalankan mekanisme. Ketiga, pembaruan pangkalan data, sebagaimana telah diatur dalam Permensos No. 5 Tahun 2019, yang dijalankan secara rutin dan dibuat lebih terbuka agar bisa dipantau publik. Basis data yang ada saat ini seharusnya diperbarui secara rutin sehingga bisa menjadi modal awal bagi penerapan intervensi kebijakan yang tepat ketika terjadi bencana nonalam dan/atau krisis serupa pada masa mendatang.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini dibuat untuk menyelesaikan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) berbasis pemberdayaan masyarakat, pengabdian dimasa pandemi bermitra dengan satgas covid-19. Kegiatan ini tidak lepas dari pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terimakasih kepada: Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah, kelancaran, kesehatan, kekuatan serta kemudahan-Nya. Orang tua, kakak adik, saudara dan kerabat yang senantiasa memberikan doa dan dukungan

moril maupun materiil serta dukungan dalam bentuk motivasi yang tiada henti. Ibu Assyifa Junitasari, S.Pd., M.Si., selaku dosen pembimbing lapangan yang senantiasa membimbing dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyusunan laporan ini sehingga dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. Bapak H. Awan Rukmawan, selaku Kepala Desa Alamendah yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan KKN-DR di Desa Alamendah. Bapak Ijang Iwan, S.Pd.I., selaku Sekretaris Desa Alamendah yang telah membantu dalam pengurusan ijin serta memberikan surat satgas COVID-19. Ibu Ai dan Bapak Utep Sutisna, selaku ketua RW. 03 Mekar Baru Desa Alamendah yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi, serta banyak membantu dalam menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan dan program kerja yang telah dirumuskan. Bapak Ust. Cecep Maulana Sidiq, selaku kepala Diniyah Takmiliah Awaliyah Nidaul Ummah yang telah memperkenankan mahasiswa untuk membantu mengajar. Bapak ust. Cuwandi Yusuf, Bapak ust. Dadang Nurjaman, Bapak H. Asep, selaku tokoh masyarakat yang banyak membantu dalam koordinasi dan mendukung terlaksananya seluruh program kerja. Ketua RT 01, Ketua RT 02, Ketua RT 03, Ketua RT 04, Ketua RT 05, Karang Taruna, yang telah membantu menyukseskan rangkaian kegiatan dari setiap program kerja. Bapak Wendiansyah, S.Mn., selaku ketua Desa Wisata Alamendah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk ikut terlibat dan membantu dalam program kerja pengenalan objek wisata baru. Bapak Aep Wiguna, selaku ketua RT 02 dan anggota divisi promotor Desa Wisata Alamendah yang telah memberikan kesempatan serta undangan untuk terlibat dalam rangkaian kegiatan Anugerah Desa Wisata. Pemuda-pemudi Kp. Mekar Baru Desa Alamendah yang telah membantu dalam menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan program kerja dari awal hingga akhir pengabdian. Masyarakat Kp. Mekar Baru Desa Alamendah yang telah banyak membantu untuk menyukseskan program yang dijalankan selama kegiatan KKN berlangsung. Teman-teman KKN Himpunan Mahasiswa Pasirjambu, Ciwidey dan Rancabali (HIMA PACIRA) yang juga telah banyak membantu dalam mempersiapkan, menjalankan, dan menyukseskan program kerja

G. DAFTAR PUSTAKA

Alamendah, D. (2019). Wilayah Administratif Desa Alamendah.

<http://alamendah.desa.id/artikel/2019/1/29/wulayah-administratif>

IDX CHannel. (2020, Agustus 5). Indonesia Resesi Teknikal, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Minus 5,32 Persen. Diambil kembali dari <https://www.idxchannel.com/market-news/indonesia-resesi-teknikal-pertumbuhan-ekonomi-kuartal-ii-minus-532-persen>

Jabar Digital Service. (2020, Desember). Mencari Solusi dengan Inovasi Digital. Dipetik January 16, 2021, dari https://drive.google.com/file/d/1RTha92bN-_PhrKMrASyDX3C1Vmlk_rFF/view

- Jabar Digital Service. (2020, Desember 30). Mencari Solusi dengan Inovasi Digital. Diambil kembali dari https://drive.google.com/file/d/1RTha92bN_PhRkMrASyDX3C1Vmlk_rFF/view
- Najoan, S. J., Mandey, & Johansen. (2011). Transformasi Sebagai Strategi Desain. *Media Matrasain*, 8(2), 119
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83–104. <https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363>
- Ombudsman. (2020). Kebijakan Bekerja Dari Rumah dan Pelayanan Publik. Retrieved Januari 14, 2021, from <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kebijakan-bekerja-dari-rumah-dan-pelayanan-publik>
- Rumbo, S. S. (2020, July 2). China dan Pandemi Covid-19. Retrieved January 10, 2021, from <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/china-dan-pandemi-covid-19>
- Satgas COVID-19. (2021, January 10). Data Sebaran. Retrieved January 10, 2021, from <https://covid19.go.id/>
- Satgas COVID-19. (2021, January 10). Peta Sebaran. Retrieved January 10, 2021, from <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- Suhudiyah, S. R. (2020). Peran Parlemen dalam Menciptakan Collaborative Governance Berbasis Pendekatan Penta Helix Stakeholder untuk Mengatasi Pandemi Covid-19. Retrieved January 10, 2021, from <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-sains-kebijakan/1419-peran-parlemen-dalam-menciptakan-collaborative-governance-berbasis-pendekatan-penta-helix-stakeholder-untuk-mengatasi-pandemi-covid-19>